

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam kehidupan saat ini masyarakat dituntut dengan berbagai kebutuhan hidup yang menjalankan beban dalam menjalani hidupnya. Demi memenuhi kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk bekerja. Dari pekerjaan tersebut manusia akan mendapatkan gaji atau upah. Dimana dengan gaji atau upah tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupannya.

Gaji atau upah mengambil peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena gaji merupakan faktor pendorong dalam kinerja karyawan sebuah perusahaan. Dimana kinerja yang bagus dapat menunjang produktivitas perusahaan. Agar upah dapat diterima sesuai dengan hak karyawan dan aktivitas perusahaan dapat berjalan lancar, maka perusahaan atau lembaga membutuhkan prosedur yang baik. Sistem administrasi penggajian merupakan proses yang menentukan tingkat penggajian pegawai, memantau atau mengawasi, mengembangkan serta mengendalikan gaji pegawai.

Gaji dapat menjadi adanya motivasi kerja bagi para karyawan, adanya motivasi kerja yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang menjadi keuntungan bagi perusahaan.

Sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan sistem kontrak bagi karyawan terutama pada perusahaan-perusahaan. Karyawan yang bekerja biasanya bersifat karyawan kontrak atau tidak tetap. Perusahaan akan memperbaharui karyawannya pada periode waktu tertentu. Hal ini jelas sebagai upaya untuk memajukan perusahaan dengan mempertimbangkan kerugian dan keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Namun perusahaan juga harus memperhatikan karyawannya dan harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang ada hubungannya dengan kinerja karyawan antara lain fasilitas kerja, lingkungan kerja yang nyaman serta kebutuhan individual (misalnya uang makan, uang transport).

Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manager, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan. (Mulyadi, 2016 : 309)

Pembayaran gaji/upah yang diterima karyawan dari perusahaan adalah bentuk balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan yang bekerja perusahaan tersebut yang berkontribusi sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pendidikan masing-masing karyawan dan timbal balik dari karyawan kepada perusahaan yaitu dengan bekerja penuh tanggung jawab dan

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan, serta mengikuti aturan yang ada dalam perusahaan tersebut.

Badan Keuangan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bandung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung yang didalamnya terdapat fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan tahun 2016 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis BKD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 206 – 2021. (Sumber BKD Kabupaten Bandung)

Adapun fenomena yang terjadi pada BKD adalah masih terjadinya keterlambatan mentransferkan uang gaji karyawan dikarenakan SP2D LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) dari Dinas mengalami hambatan karena adanya karyawan yang meminjam dana kantor untuk keperluan pribadi dan terkadang ada sebagian karyawan yang telat membayarkan tunggakannya ke kantor dengan berbagai alasan. Seperti contohnya tidak sesuai tanggal yang dijanjikan untuk mengembalikan dana kas kantor tersebut, dan juga ada alasan dengan belum adanya dana yang cukup untuk mengembalikan pinjaman ke kantor. Serta SP2D sendiri tidak bisa tepat waktu untuk mentransferkan gaji karyawan kepada BKD (Badan Keuangan Daerah) karena mengalami kekurangan dana untuk mentransferkan gaji karyawan kepada BKD. Dalam setahun SP2D LS mengalami hambatan yang seperti ini terjadi 4x atau 5x

dalam setahun dan ini yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan proses pencairan dana sering terjadi dan mengakibatkan kesalahpahaman diakhir pelaporan nanti. Hampir 60% karyawan meminjam dana kantor untuk beberapa keperluan pribadi padahal sudah diberi gaji pokok+tunjangan yang diberikan, seperti tunjangan istri,anak,beras,dsbnya. Pada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) jika terlambat membayar tunggakan yang telah dipinjam dari kas kantor akan mendapatkan sanksi dengan memotong gaji karyawan sebesar 5% dari gaji karyawan yang diterima.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut dan dalam Laporan Tugas Akhir ini penullis akan tuangkan laporan dengan judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGGAJIAN KARYAWAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah bahwa terjadi masalah yang terjadi di Dinas yaitu pada SP2D LS yang masih terjadinya keterlambatan mentransferkan gaji karyawan dikarenakan SP2D LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) dari Dinas mengalami hambatan karena adanya karyawan yang meminjam uang kantor untuk keperluan pribadi dan terkadang ada sebagian karyawan yang telat membayar tunggakannya ke kantor dengan berbagai alasan. Seperti contohnya tidak sesuai tanggal yang di janjikan untuk mengembalikan dana tersebut, dan juga ada alasan dengan belum adanya dana yang cukup untuk mengembalikan pinjaman ke kantor. Serta SP2D LS sendiri tidak bisa tepat waktu untuk mentransferkan gaji karyawan kepada BKD karena mengalami kekurangan dana untuk mentransferkan gaji karyawan. Hampir 60% karyawan meminjam dana kantor untuk beberapa keperluan pribadi padahal sudah diberi gaji pokok+tunjangan yang diberikan, seperti tunjangan istri,anak,beras,dsbnya. Dalam setahun SP2D mengalami hambatan yang seperti ini terjadi 4x atau 5x dalam setahun. Pada peraturan yang dibuat oleh Pemda jika terlambat membayar tunggakan yang telah dipinjam dari kas kantor akan mendapatkan sanksi dengan memotong gaji karyawan sebesar 5% dari gaji karyawan yang diterima.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana hambatan prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dalam mengatasi hambatan tersebut?

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian tugas akhir ini untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang muncul pada prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi pada prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Di harapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan yang terkait atau berhubungan dengan prosedur penggajian karyawan dan hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian tugas akhir dengan topik yang sama.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa Universitas Komputer Indonesia program studi Akuntansi.

## **1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitiann**

### **1.6.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian**

Dalam rangka penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Komplek Penda Jl. Raya Soreang Km.17 Pamekaran, Soreang.

### **1.6.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan 12 Maret – 12 Mei 2018. Sedangkan pengambilan data dilakukan setiap hari kerja staff Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. (menyesuaikan jadwal BKD).

**Tabel 1.1**  
**Waktu Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
<b>Persiapan Penelitian</b>								
1.	Mencari tempat penelitian							
2.	Melakukan wawancara							
3.	Mengajukan proposal usulan permohonan penelitian							
<b>Pengumpulan Data</b>								
4.	Melaksanakan Penelitian							
5.	Pengambilan dan Pengumpulan Data							
<b>Penyusunan Laporan Penelitian</b>								
6.	Penyusunan Penelitian							
7.	Bimbingan dan Revisi Penelitian							
8.	Sidang Tugas Akhir							

